

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan yang berhubungan dengan informasi akuntansi merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar pada proses pengambilan keputusan bagi investor di pasar modal. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan. Jika dilihat dari sisi kinerja keuangan, maka kinerja perusahaan dapat diukur melalui *Return On Assets (ROA)* dan *Cost of Debt*, sedangkan jika dilihat dari sisi kinerja non keuangan, maka dapat diukur melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Return On Assets (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Cost of Debt* merupakan tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam membayar hutangnya saat ini. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungan serta dapat mendorong kualitas hidup masyarakat, selain itu CSR juga mampu meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah dengan mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak, maka Pemerintah dapat melakukan

program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Namun, banyak wajib pajak badan (Perseroan) yang masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya tingkat daya beli wajib pajak (Santoso *et al.*, 2013:1). Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
Dalam triliyun rupiah

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.027,37	1.294,26	1.355,20	1.283,60
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.147,50
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,40%

Sumber: www.pajak.go.id

Meskipun dalam realisasi pajak secara terus menerus mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN untuk setiap tahunnya tidak pernah tercapai dengan baik. Salah satu yang menjadi penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran diri dari wajib pajak tersebut. Banyak dari wajib pajak yang terutama merupakan badan usaha yang melakukan penghindaran pajak yang secara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan juga secara ilegal atau yang biasa dikenal dengan pengelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan agar dapat mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan cara memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan yaitu adanya denda yang dikenakan, serta buruknya reputasi

perusahaan di mata publik dikarenakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Apabila tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melebihi batasnya ataupun melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka aktivitas tersebut dapat tergolong dalam tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Fenomena yang terkait dengan kasus penghindaran pajak yaitu pada sektor otomotif di Indonesia. Pada tahun 2013, terjadi suatu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dalam kasus ini, laporan pajak TMMIN menyatakan bahwa nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun di sisi lain pihak Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun tersebut, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum tahun 2003, perakitan mobil (*manufacturing*) masih bergabung dengan bagian distribusi dibawah bendera Toyota Astra Motor (TAM), namun setelah tahun 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN, sedangkan untuk bagian distribusi dan pemasaran berada dibawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual terlebih dahulu ke TAM, kemudian dari TAM akan dijual ke Auto 2000. Dari auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Dengan adanya pemisahan ini, maka margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan dari 11% hingga 14% per tahun. Namun, pada saat setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika

gross margin TAM dan TMMIN digabung, maka presentasinya masih sebesar 7%. Hal ini berarti masih lebih rendah jika dibandingkan saat masih bergabung yang mana dapat mencapai 14%. “Lalu kemanakah larinya 7% tersebut?” begitu tanya Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak (nasional.kontan.id , 2013).

Fenomena lain yang terkait dengan kasus penghindaran pajak yaitu terjadi pada pimpinan PT. Samsung Electronics yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghindaran pajak senilai 8,2 miliar won atau sekitar Rp 102 miliar. Pemimpin yang bernama Lee Kun Hee tersebut dan seorang eksekutif dari PT. Samsung Electronics mengelola dana di 260 rekening bank yang menggunakan nama 72 pejabat eksekutif. Polisi menambahkan ratusan rekening bank tersebut berisi dana sebesar 400 juta won. Rekening-rekening tersebut ditemukan dalam penyelidikan terkait masalah pembayaran renovasi kediaman keluarga Lee. Penyelidikan ini membuka kembali kasus keterlambatan pembayaran pajak senilai 130 miliar won, atau sekitar Rp 1,6 triliun pada tahun 2011. Penghindaran pajak tujuh tahun lalu itu berujung pada penahanan Jay Y. Lee, yaitu putranya pada tahun 2017 lalu dan mendasari jatuhnya mantan Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun Hye. Samsung akhirnya memberikan otoritas lebih besar bagi jajaran manajemen tingginya untuk mengurangi pengaruh keluarga Lee. (kabar24.com, 2018)

Dari fenomena tersebut, maka peneliti memilih untuk menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan dalam tiga bulan pertama, penerimaan di sektor manufaktur menjadi penyumbang

terbesar yakni Rp 63,91 triliun atau 28,1 persen kontribusinya terhadap penerimaan total. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa geliat industri manufaktur mulai kembali lagi. Hal ini dikarenakan harga komoditas yang mengalami penurunan sehingga orang kembali lagi untuk melakukan aktivitas ekonomi di sektor industri manufaktur. Selain itu, geliat di sektor manufaktur juga ditandai dengan realisasi pada jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang tumbuh 21,56 persen atau menyumbang penerimaan paling besar yakni Rp 40,71 triliun (metrotvnews.com, 2018).

Landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan untuk mendukung analisis mengenai penelitian yang akan dilakukan dan yang akan dijadikan landasan penyusunan hipotesis beserta analisisnya adalah teori agensi dan teori legitimasi. Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan ada konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi dan *moral hazard*. Meminimalisir konflik tersebut maka

diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, salah satu bentuknya adalah dengan adanya transparansi informasi. Transparansi informasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap kinerja ekonomi perusahaan dengan mendisiplinkan karyawan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk mengambil keputusan terkait kebijakan untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti pemilihan investasi yang lebih baik dan manajemen aset yang lebih efisien. Sedangkan, hubungan antara teori legitimasi dengan penelitian ini adalah ketika perusahaan melakukan tindakan yang kurang etis, atau melakukan tindakan yang melanggar norma, perusahaan akan berusaha menjaga citranya dan menjaga legitimasi dari masyarakat dengan media berupa CSR. Dengan mengungkapkan CSR lebih banyak, internal perusahaan berusaha agar masyarakat tetap mendukung kegiatan usahanya meskipun perusahaan tersebut sebenarnya telah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma masyarakat.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hardeck *et al.* (2018) menunjukkan bahwa persepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat relevan ketika menyangkut tanggapan konsumen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara penghindaran pajak dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian

kedua yang dilakukan oleh Atikah *et al.* (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan perilaku kebijaksanaan manajerial yang diharapkan dapat mempengaruhi dan meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Eka & Muid (2017) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap ROA dan nilai perusahaan. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2017) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Pratiwi & Djakman (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif melakukan penghindaran pajak maka akan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih tinggi untuk menjaga keabsahan kegiatan operasional mereka dan menutupi tindakan oportunistik, namun variabel koneksi politik tidak terbukti memoderasi dampak penghindaran pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian keenam yang dilakukan oleh Arfiyanto & Arfiyanto (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Wijaya & Hadiprajitno (2017) menemukan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ke delapan yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) menunjukkan bahwa *agresivitas pajak* berhubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Lim (2011) meyakini bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan adanya fenomena dan *gap* tersebut, maka penelitian yang berjudul **“Dampak *Tax Avoidance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)”** penting untuk dilakukan, dikarenakan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten antara peneliti satu dan peneliti lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *tax avoidance* memiliki dampak signifikan terhadap kinerja non-keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dampak signifikan *tax avoidance* terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menguji dampak signifikan *tax avoidance* terhadap kinerja non-keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, tambahan informasi, dan referensi dalam ruang lingkup akademik, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai dampak *tax avoidance* terhadap kinerja perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah sebagai Regulator Pajak

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal pembuatan kebijakan pajak yang lebih baik dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang.

b. Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan-perusahaan agar terhindar dari isu penghindaran pajak

c. Bagi Investor

Membantu investor dalam memahami praktek penghindaran pajak

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal mengenai apa yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang menggunakan deskriptif dan SEM-PLS serta pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya, yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini.

